



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jendral Sudirman No.3 , Kode Pos 29433
Telepon . (0778) 459503 Faks . (0778) 452826
Laman : <https://dishub.batam.go.id> Pos-el : dishub@batam.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
NOMOR 005 TAHUN 2024**

TENTANG

**PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, maka perlu disusun peta proses bisnis pada Dinas Perhubungan Kota Batam;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

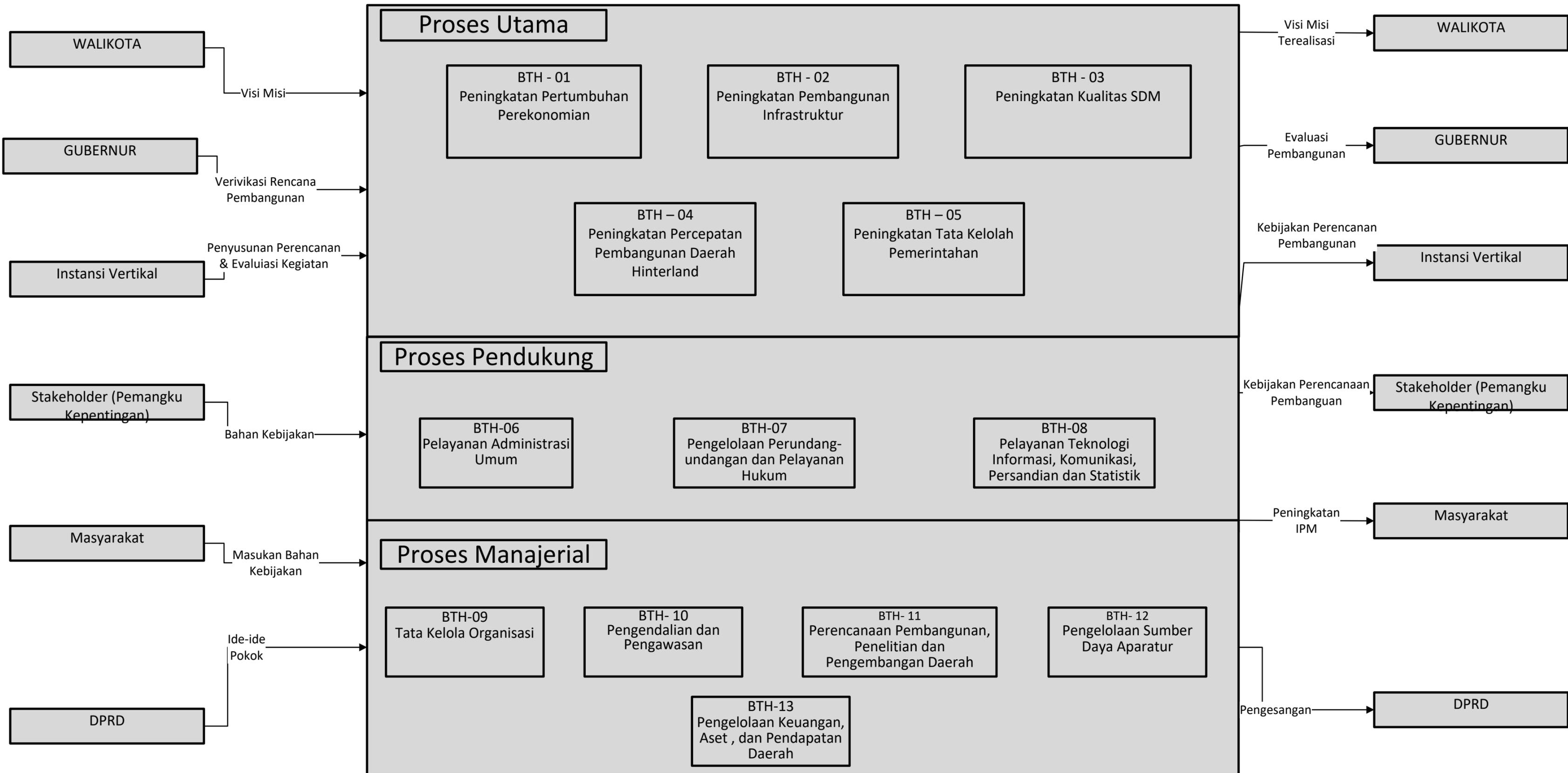
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2024
- PERTAMA : Menetapkan Peta Proses Bisnis pada Dinas Perhubungan Kota Batam sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam mewujudkan birokrasi yang profesional serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal, 05 Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM

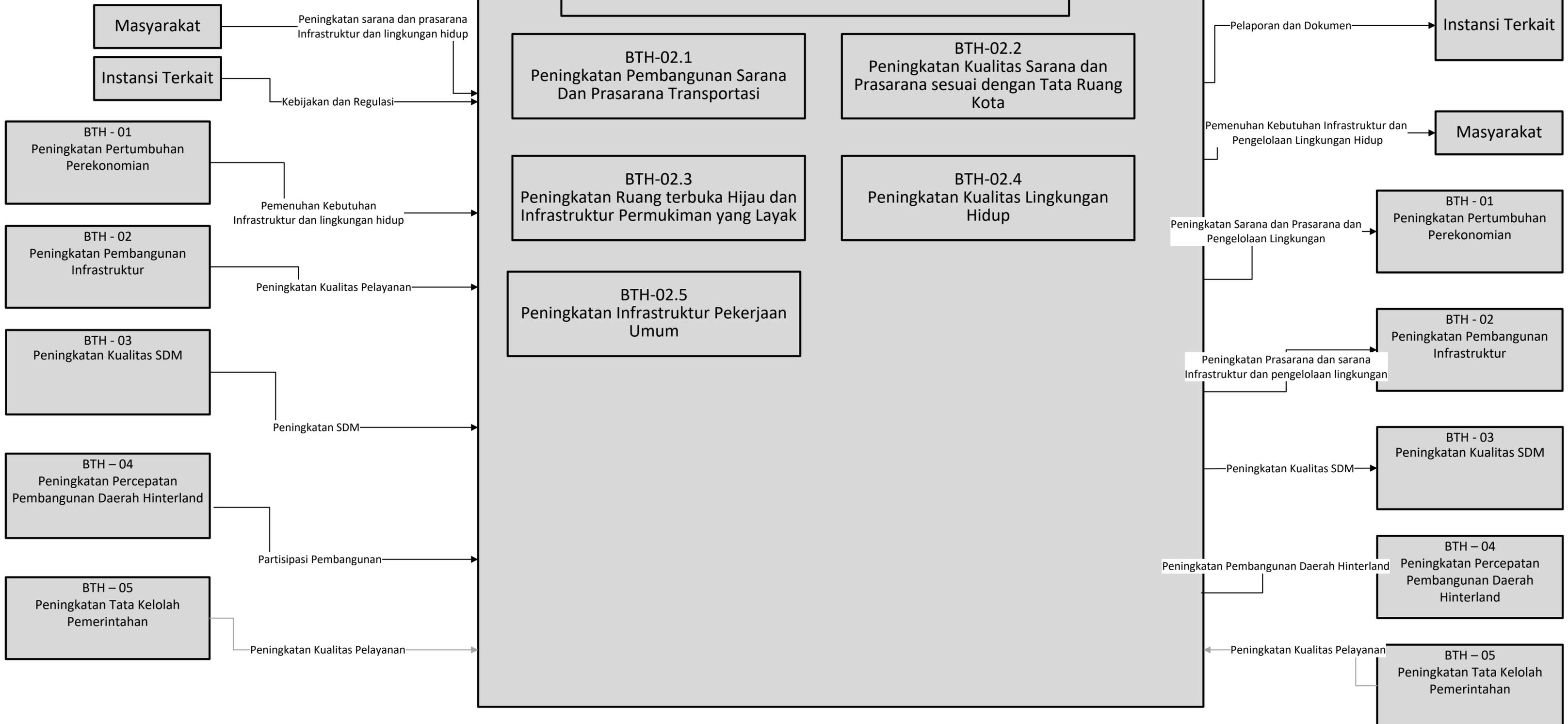


SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19681021 199010 1 001



PETA SUB PROSES

BTH - 02
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup



PETA RELASI

BTH - 02.1

PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

DINAS PERHUBUNGAN

BADAN PERENCANAAN &
PENELITIAN PEMBANGUNAN
DAERAH - BAPELITBANGDA

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- BPKAD

BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA

INSPEKTORAT DAERAH

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

BAGIAN ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA

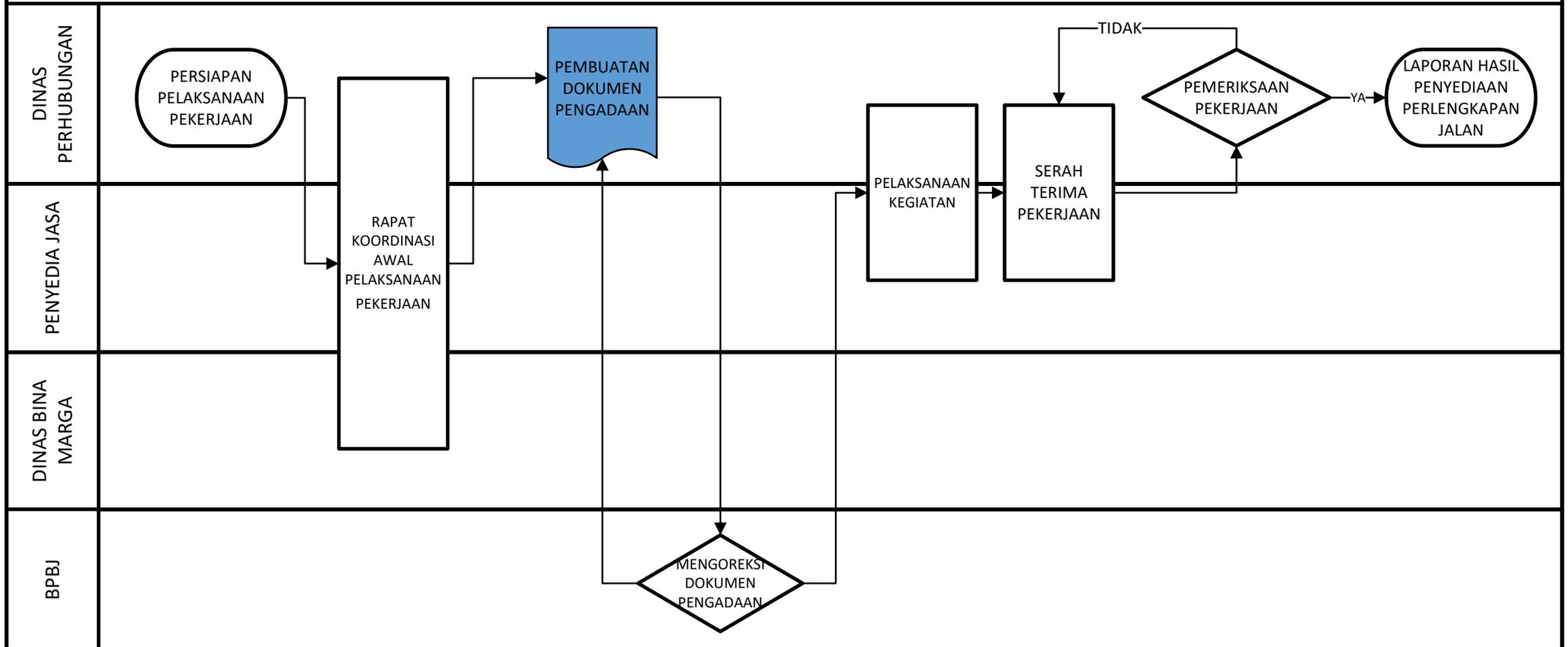
BAGIAN HUKUM

BAGIAN UMUM

SATPOL PP

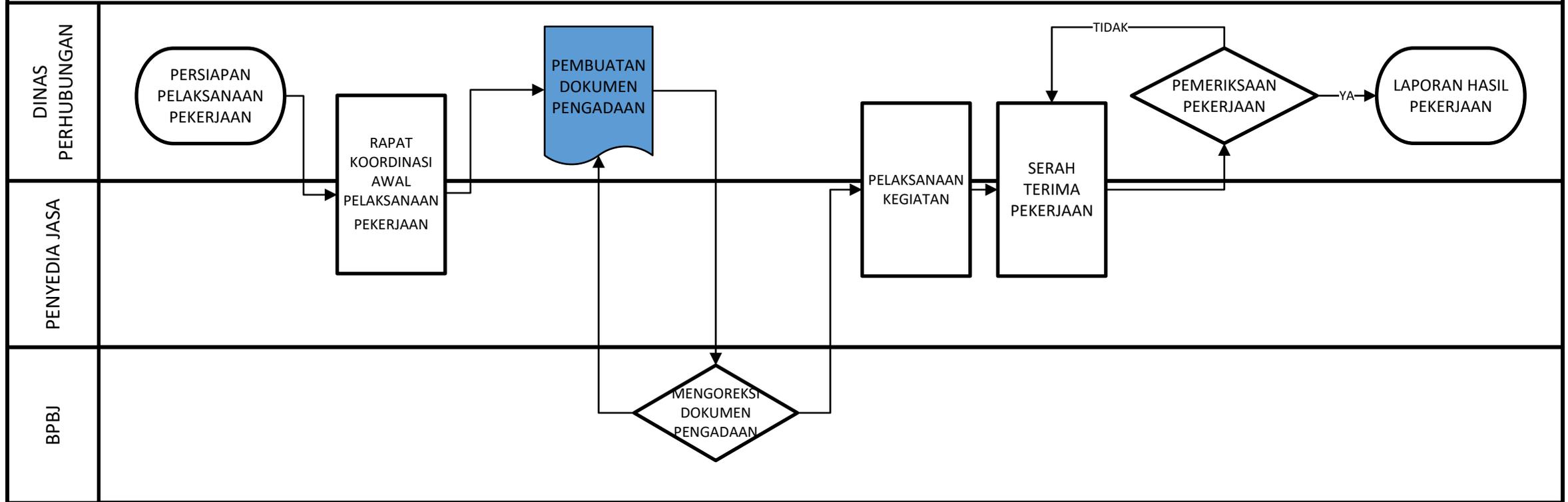
DINAS BINA MARGA DAN SDA

PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA



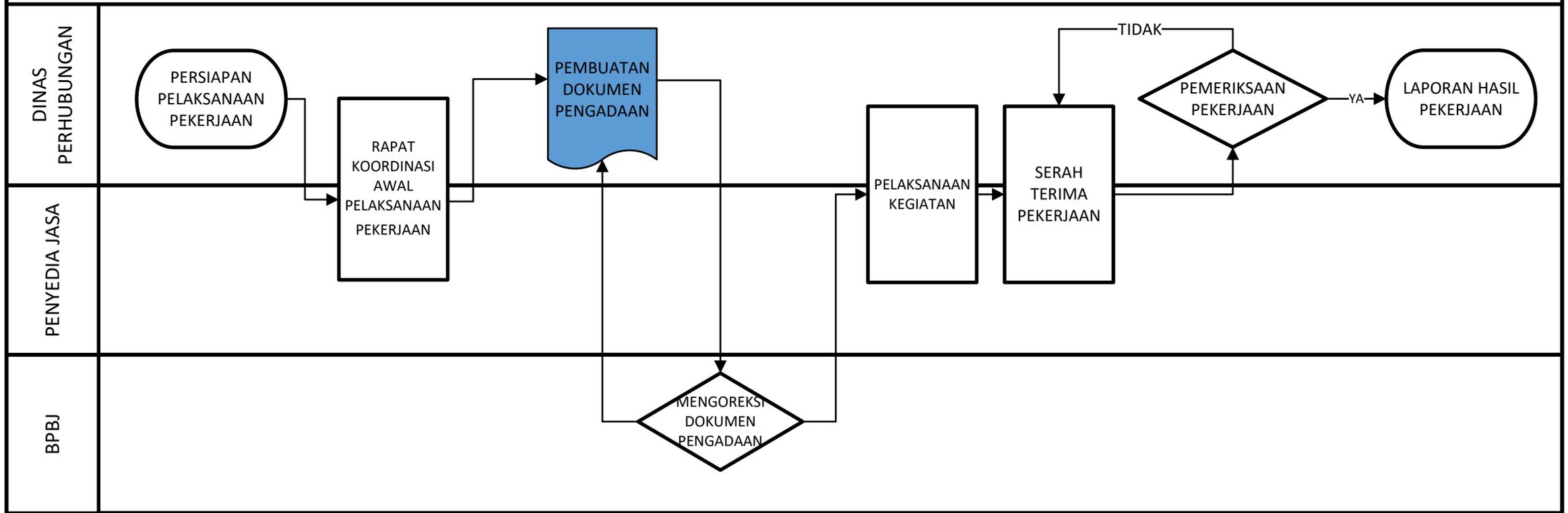
PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR



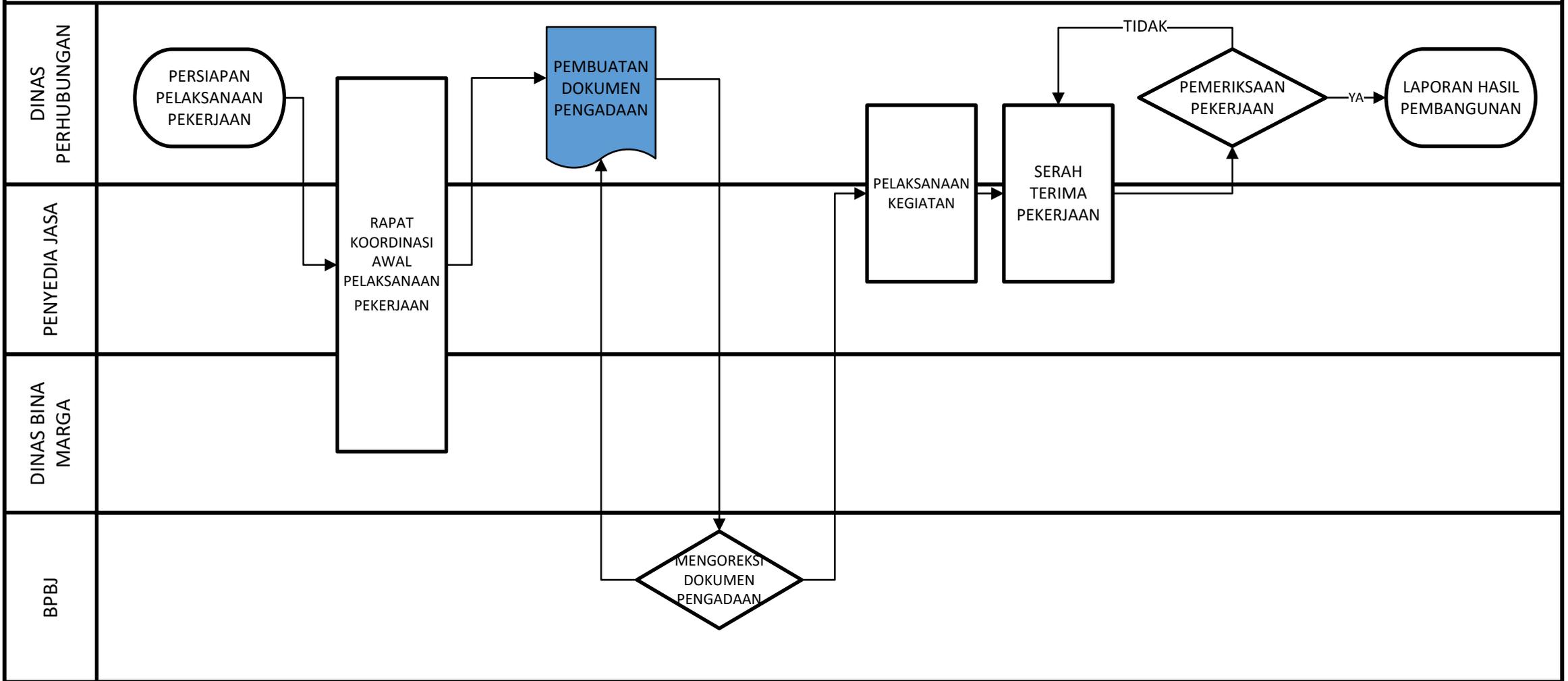
PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

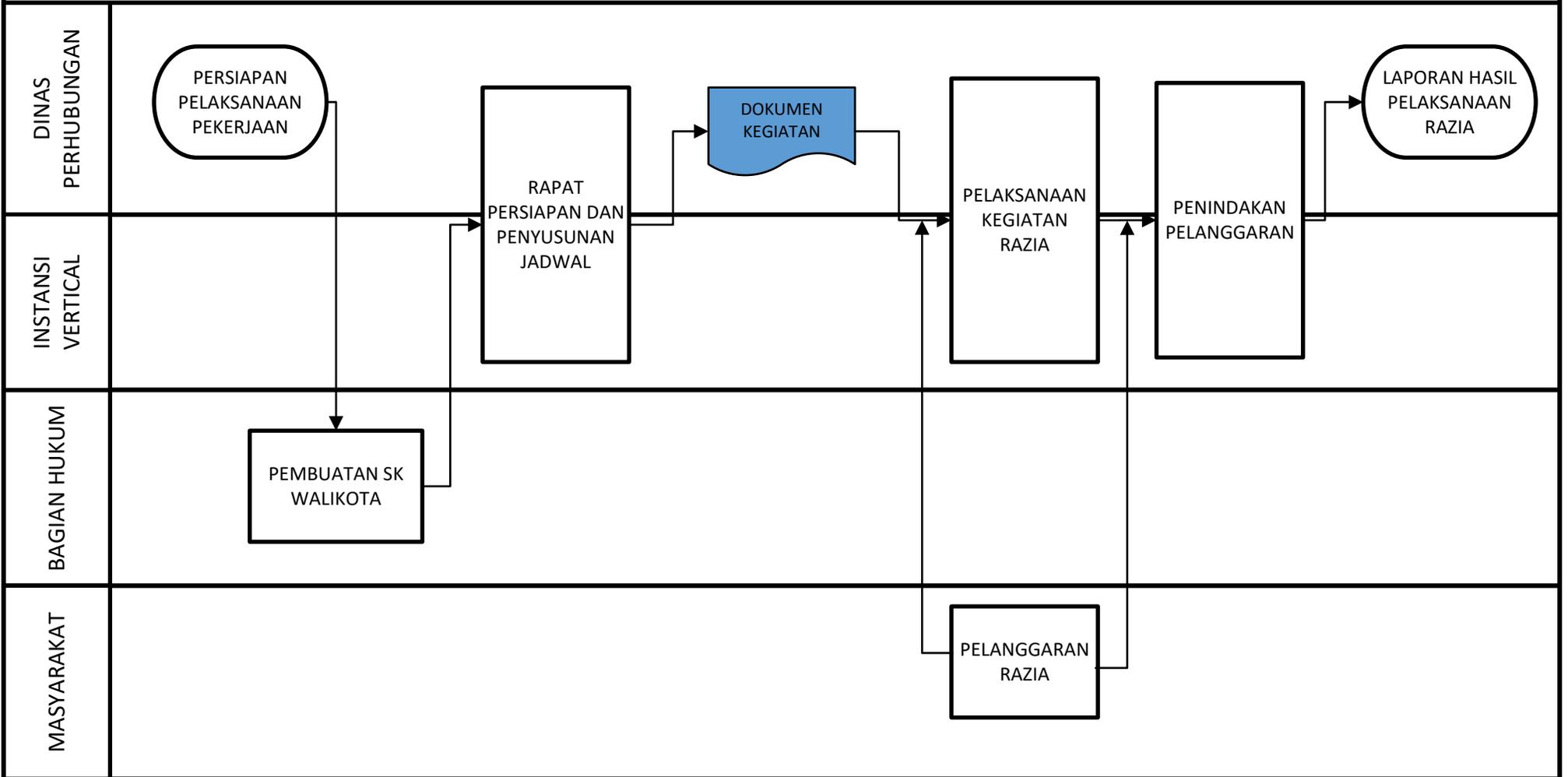
PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

BTH-02.1 CFM 05

AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN

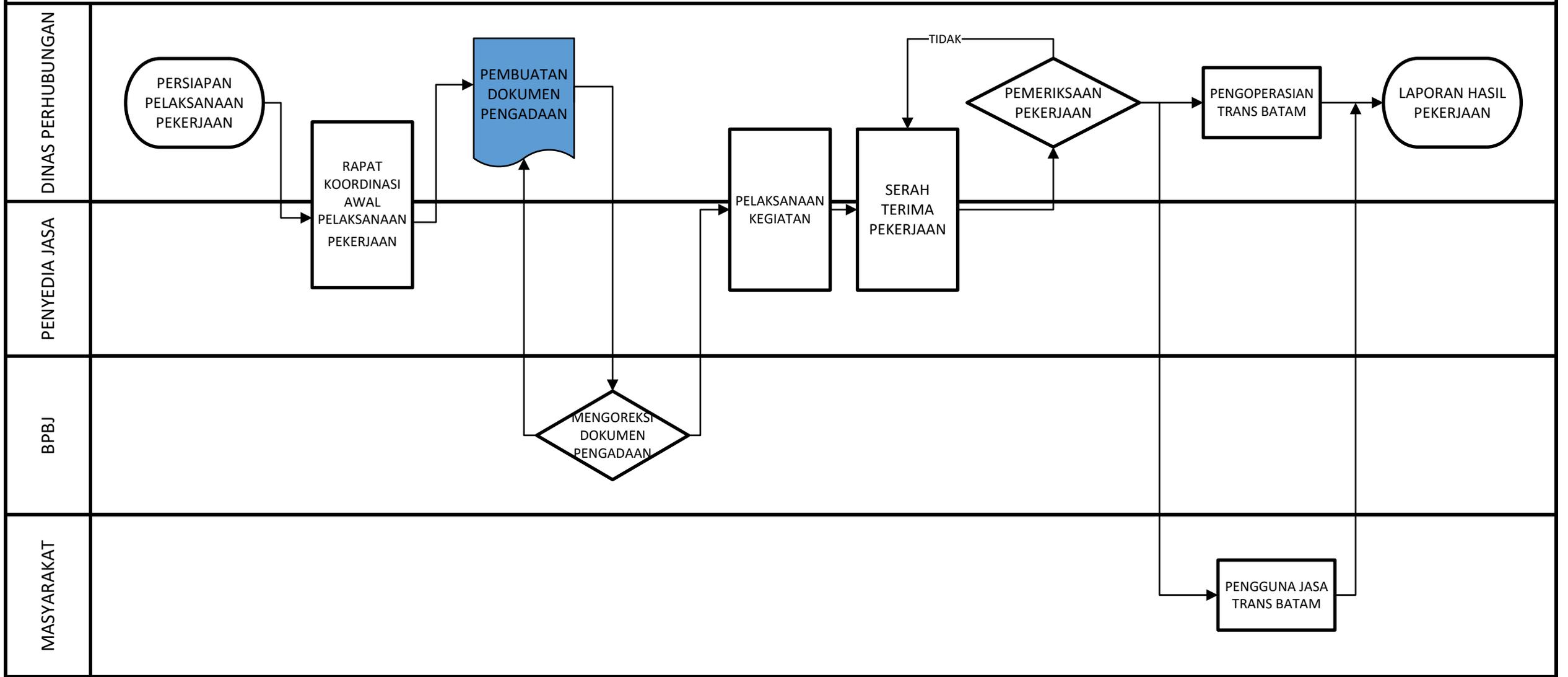


Instansi Vertical :

1. TNI
2. Polisi
3. Satpol PP

BTH-02.1 CFM 06

PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

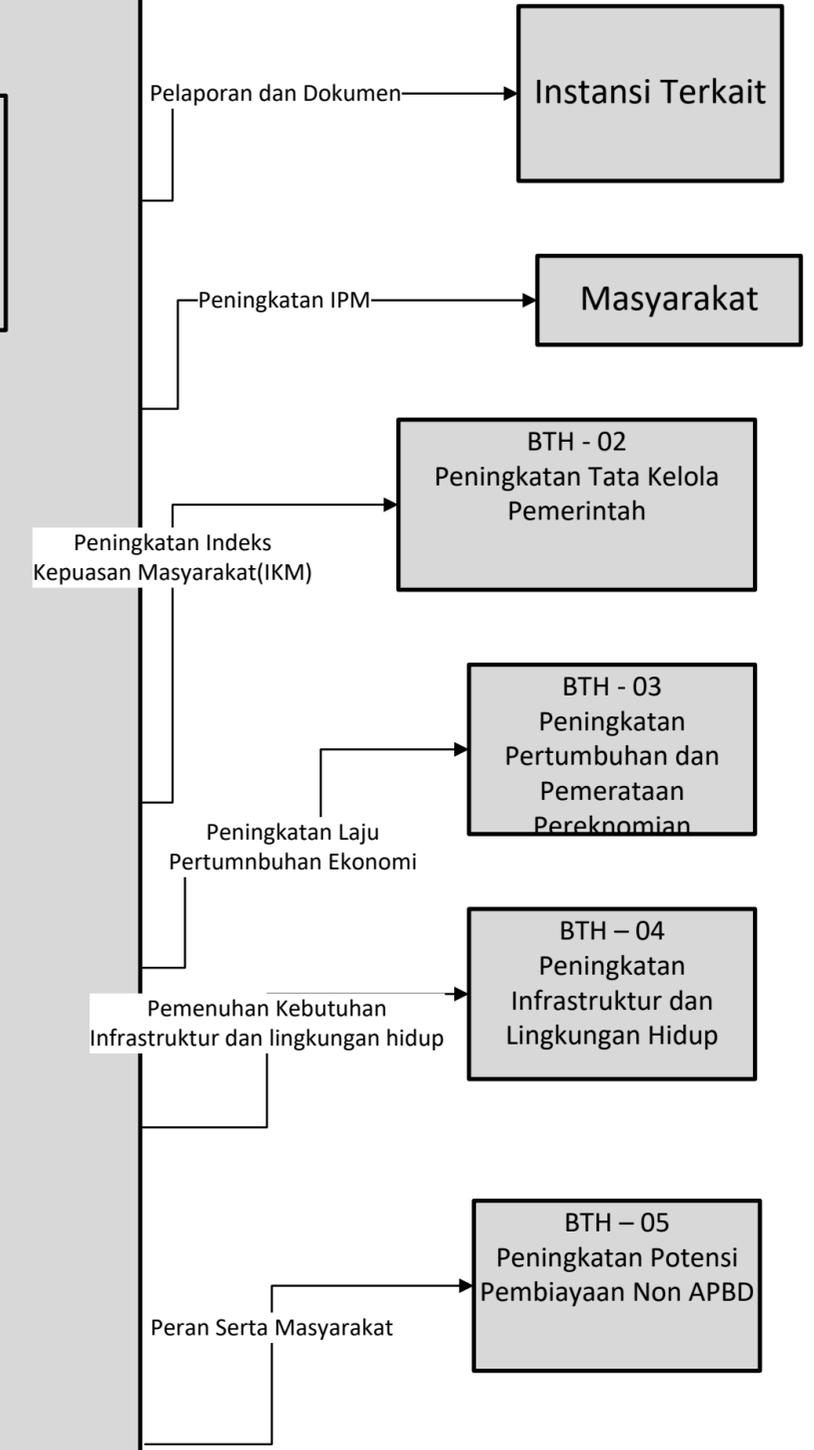
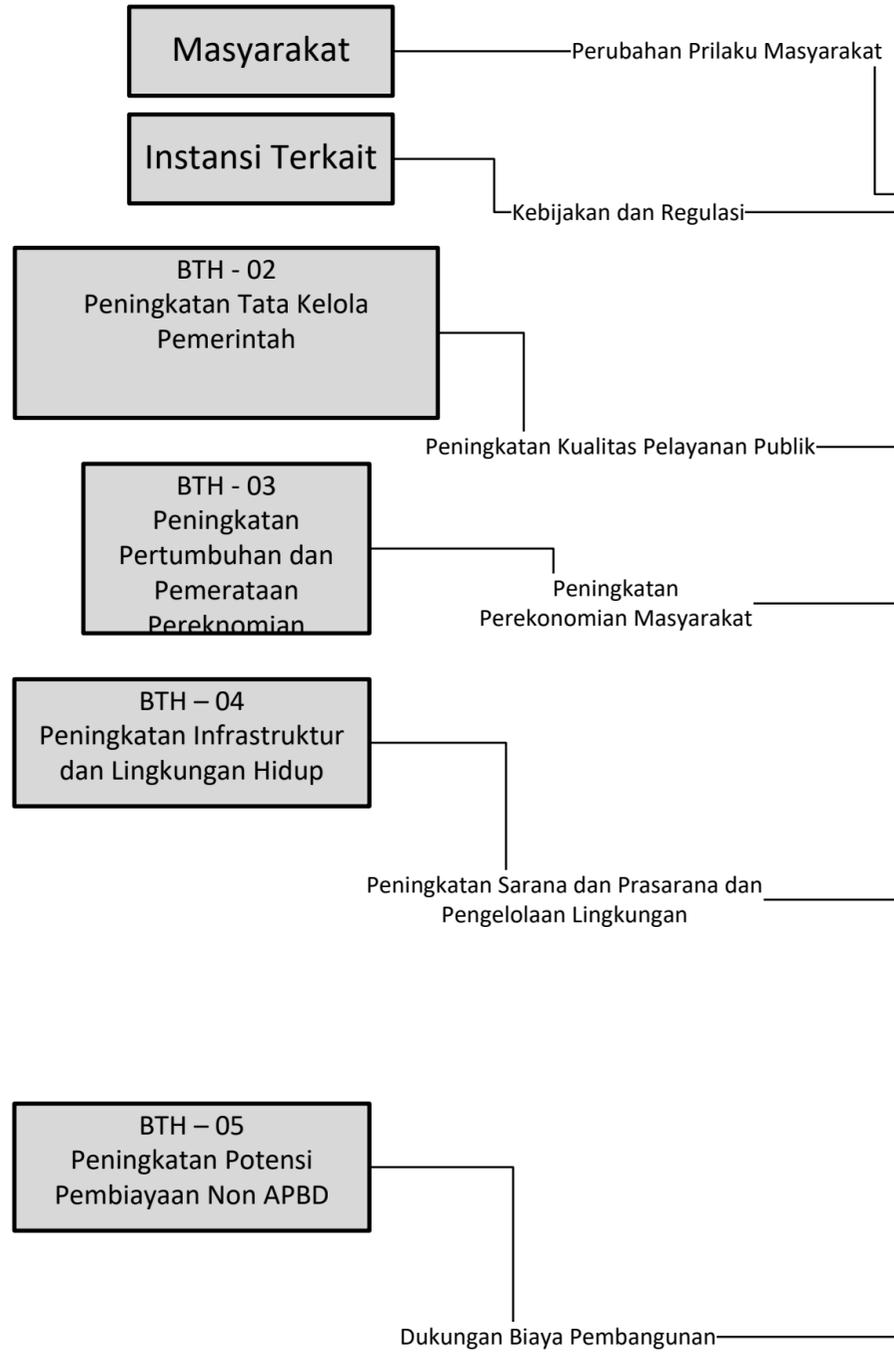
PETA SUB PROSES

BTH – 04
Peningkatan Percepatan Pembangunan Daerah Hinterland

BTH-04.1
Peningkatan Pembangunan
Infrastruktur Dan Transportasi
Perhubungan Di Wilayah Hinterland

BTH-04.2
Peningkatan Kualitas Dan Cakupan
Pelayanan Air Bersih Dan Sanitasi Di
Wilayah Hinterland

BTH-04.2
Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana
Permukiman Yang Layak Dan
Terjangkau Di Hinterland



PETA RELASI

BTH – 04.1

PENINGKATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH HINTERLAND

DINAS PERHUBUNGAN

BADAN PERENCANAAN &
PENELITIAN PEMBANGUNAN
DAERAH - BAPELITBANGDA

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- BPKAD

BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA

INSPEKTORAT DAERAH

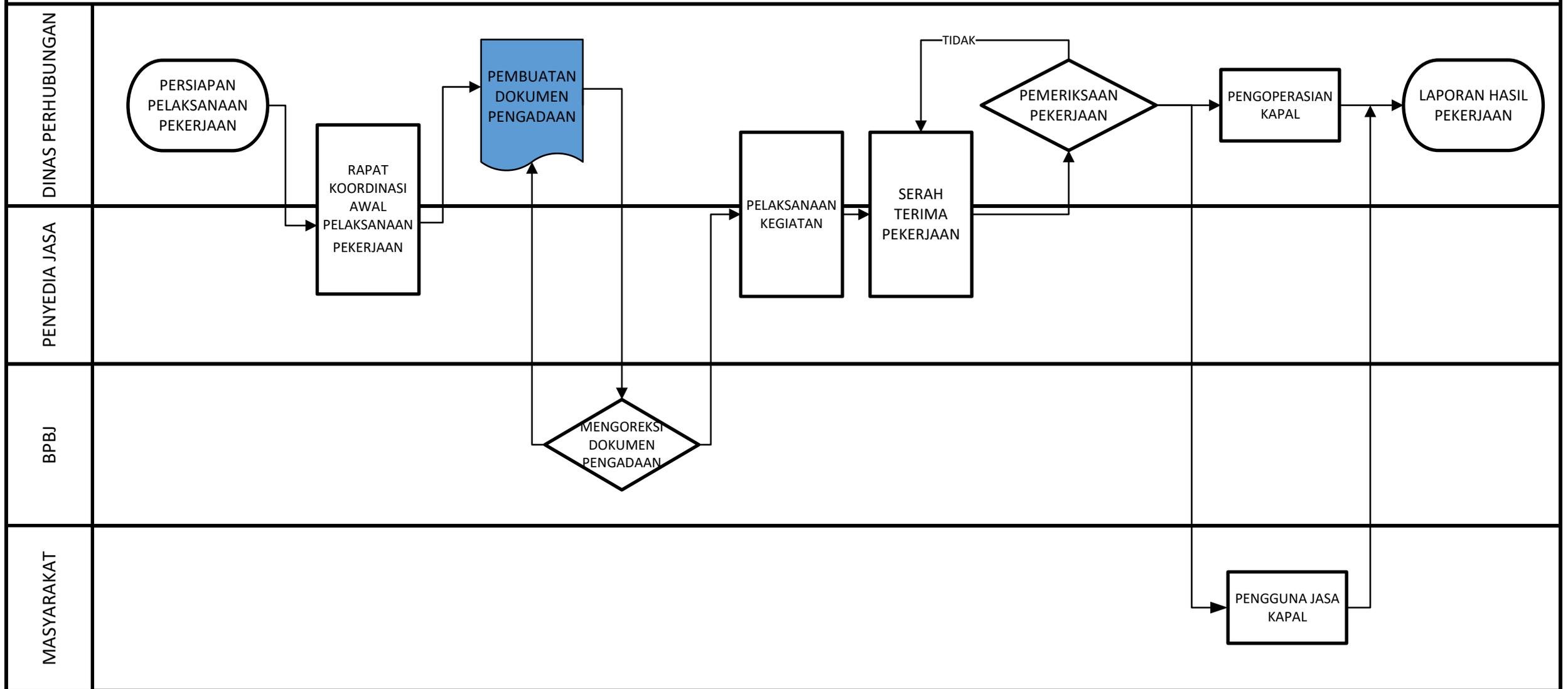
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

BAGIAN ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA

BAGIAN HUKUM

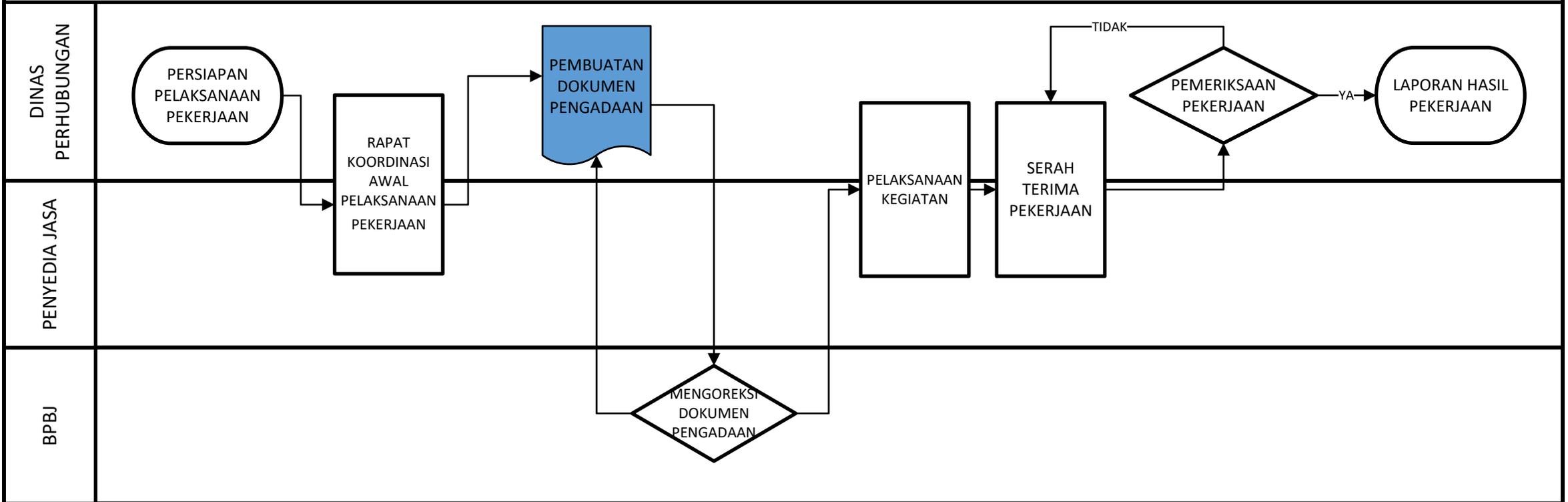
BAGIAN UMUM

PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU JARINGAN JALUR KERETA API KABUPATEN/KOTA

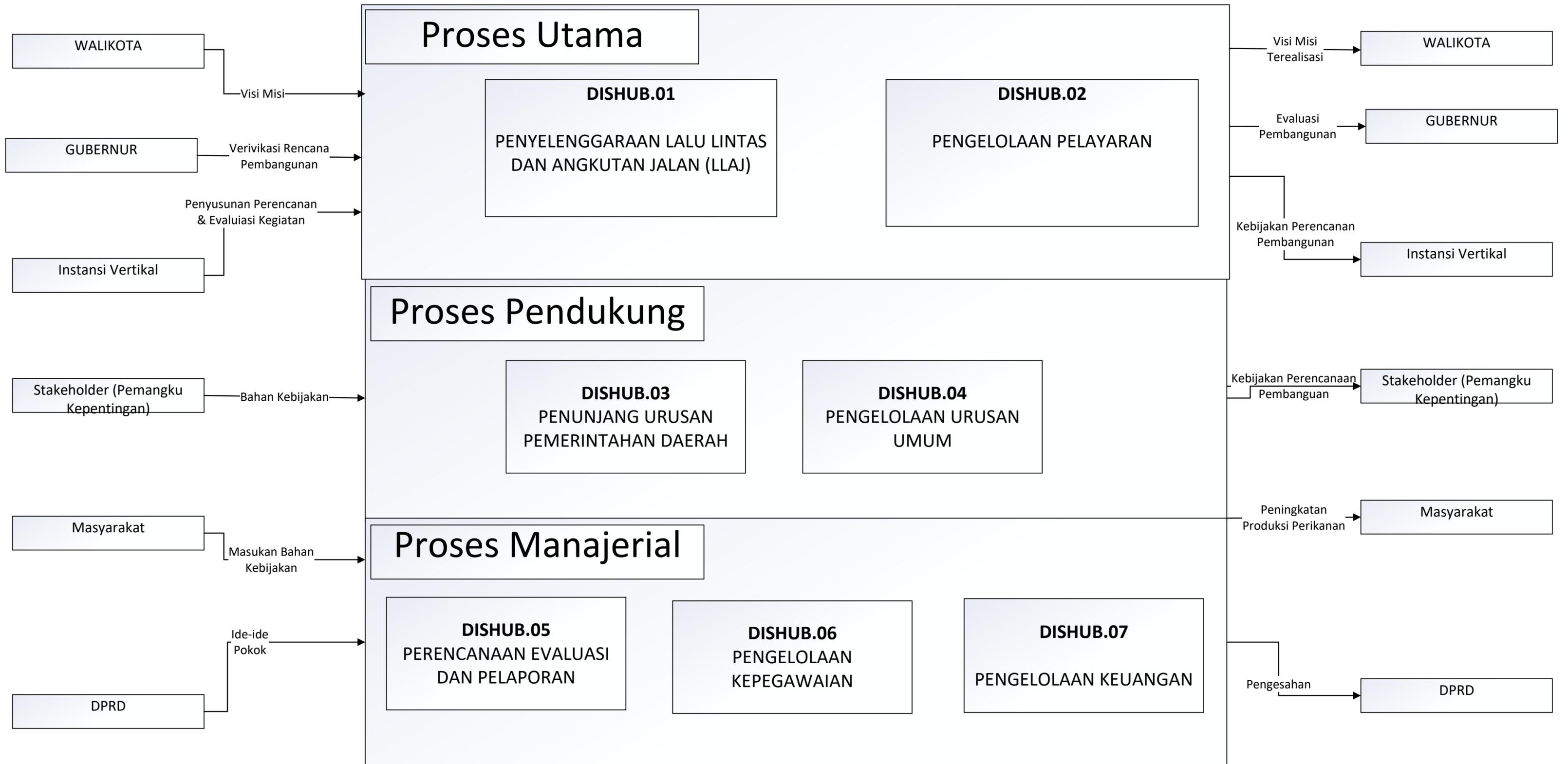


PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

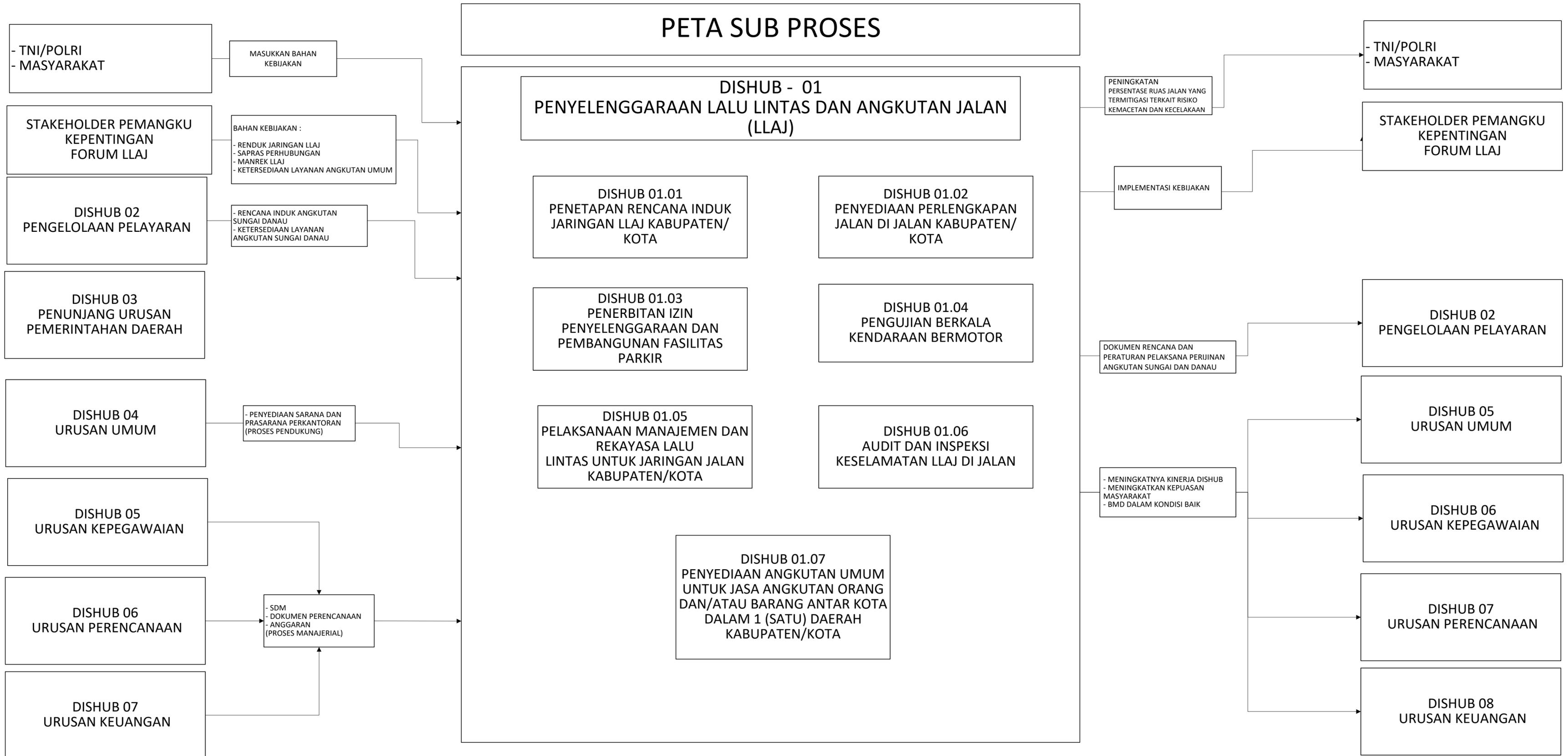
PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas



PETA SUB PROSES



PETA RELASI

DISHUB 01.01

PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA

BIDANG PRASARANA
PERHUBUNGAN

BIDANG LAUT

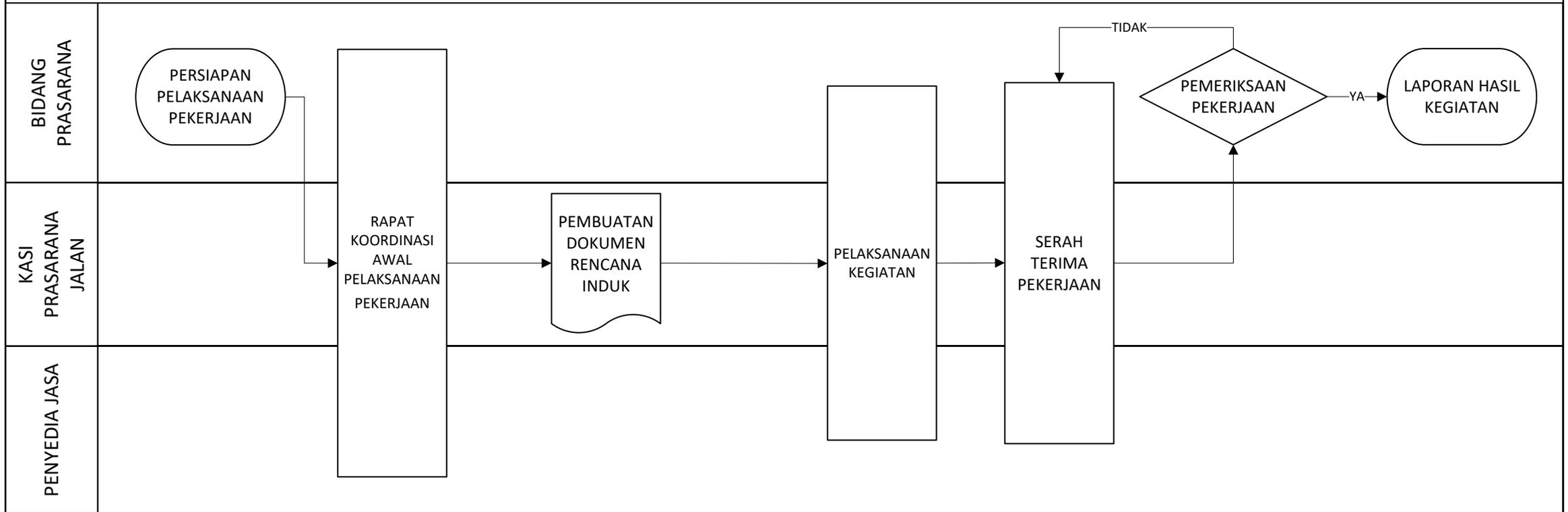
BIDANG LALU LINTAS

BIDANG ANGKUTAN

KEPALA DINAS

SEKSI PRASARANA JALAN

PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA



PENYEDIA JASA :

1. Kontraktor
2. Konsultan Perencana
3. Konsultan Pengawas

PETA RELASI

DISHUB 01.02

PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA

BIDANG PRASARANA
PERHUBUNGAN

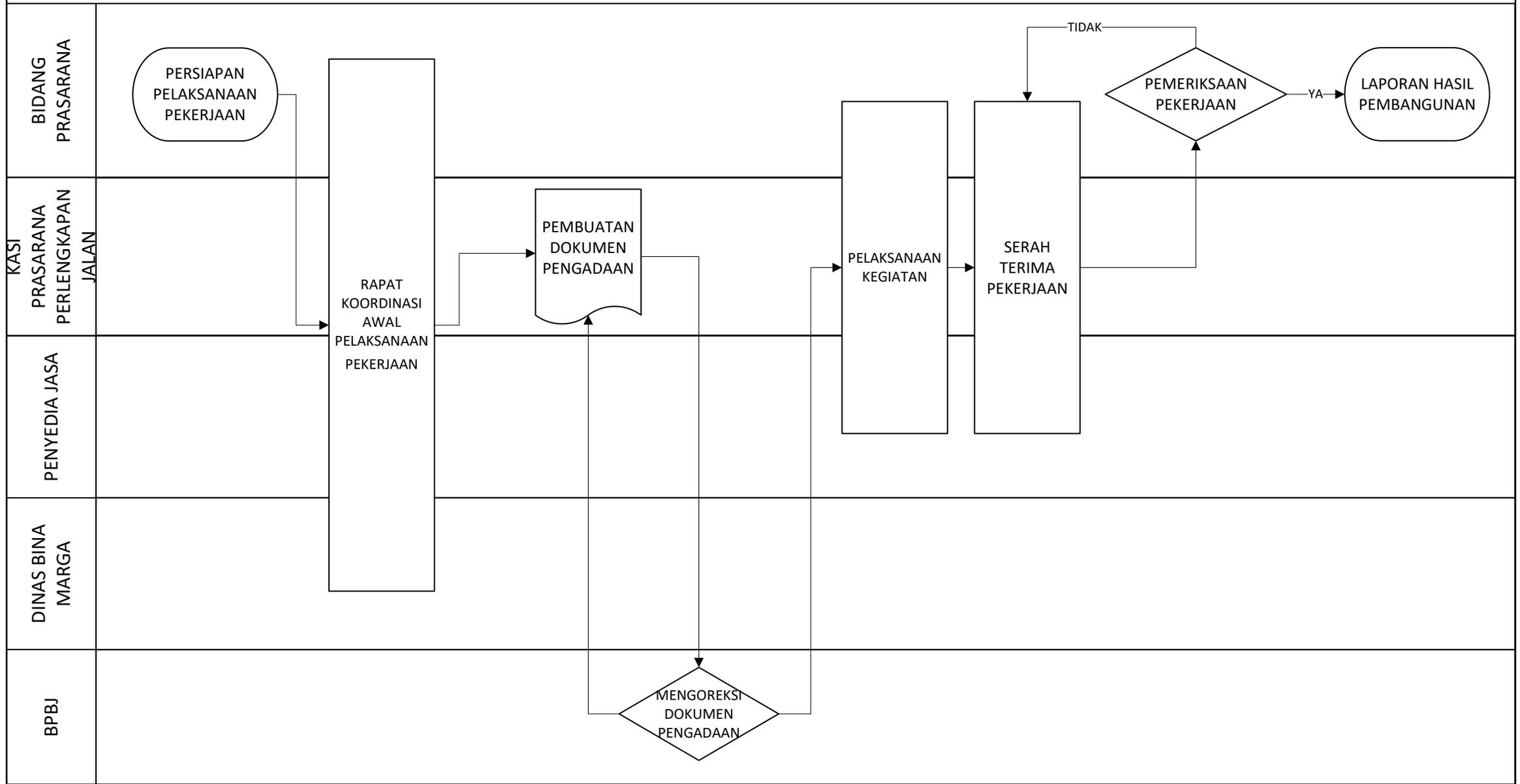
KEPALA DINAS

SEKSI PRASARANA
PERLENGKAPAN JALAN

SEKSI PRASARANA
JALAN

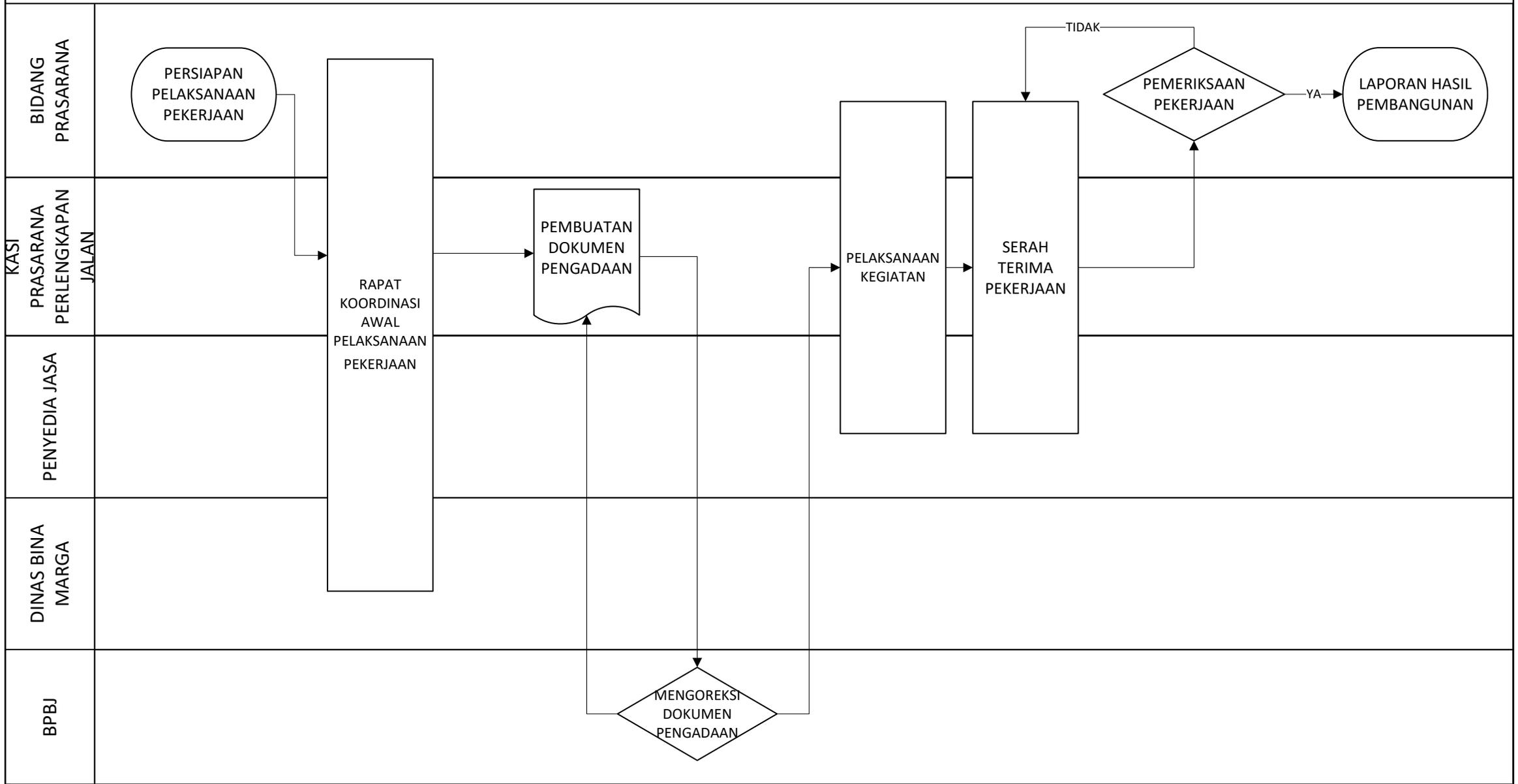
ANALIS KEBIJAKAN
AHLI MUDA

PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA



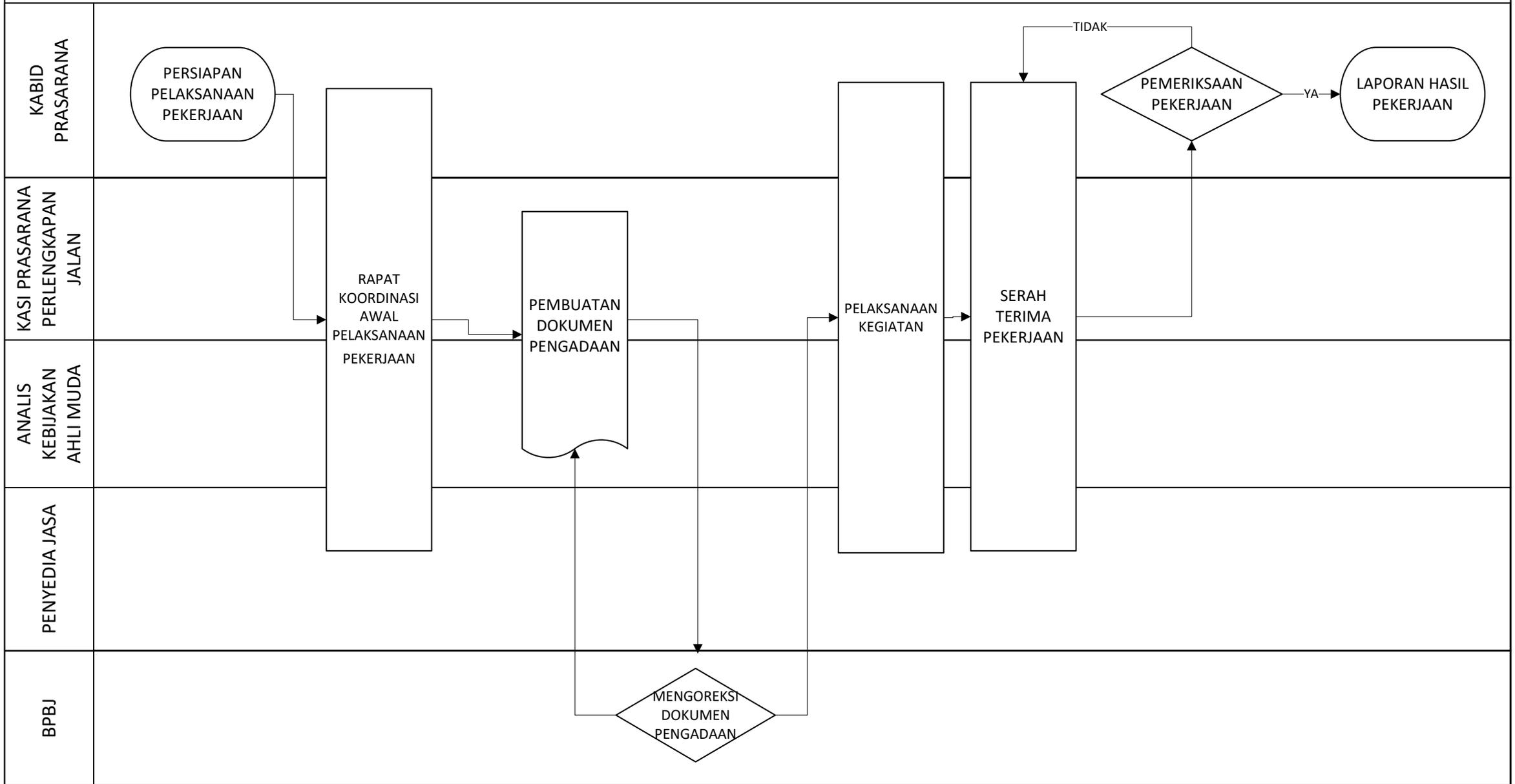
PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA



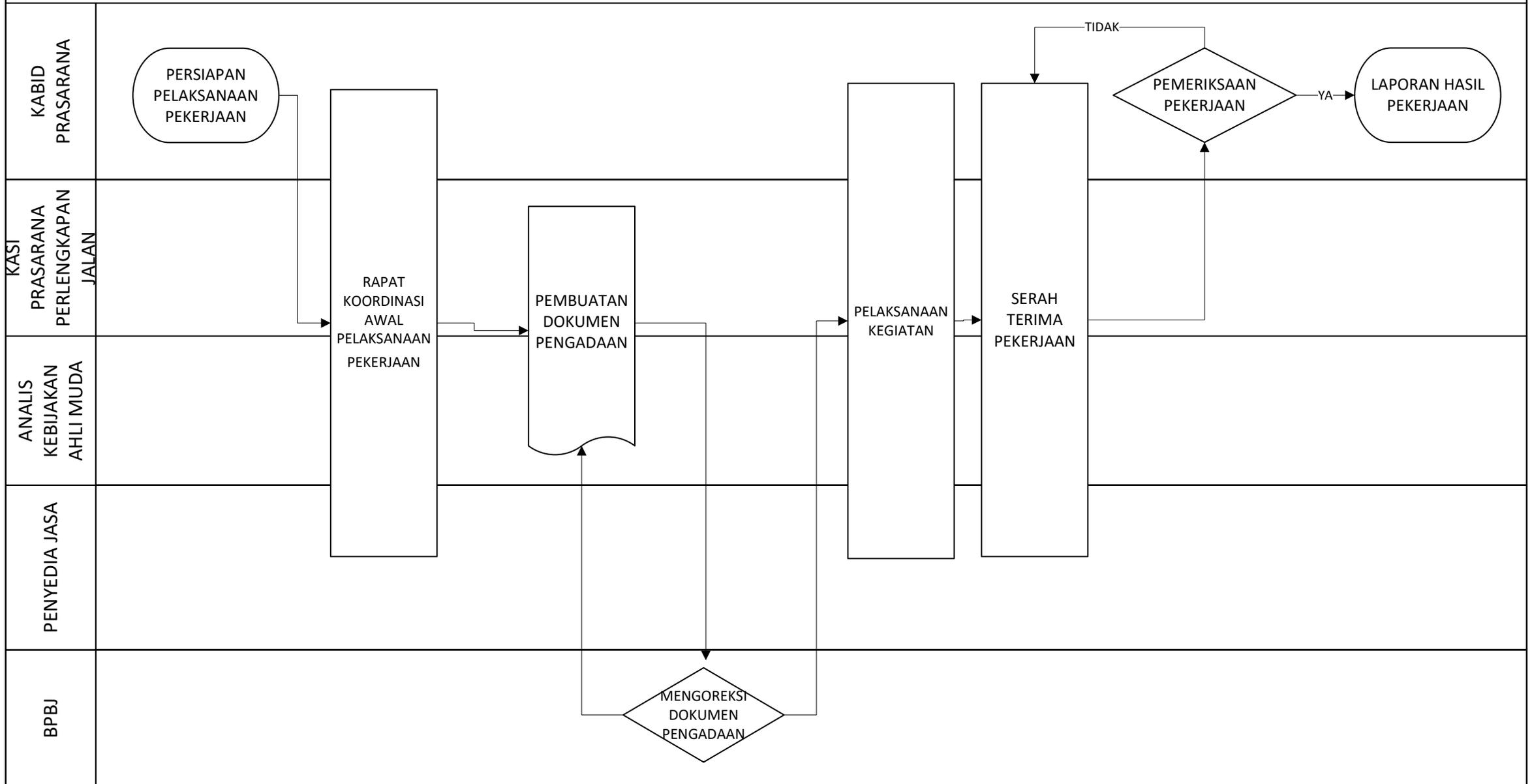
PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN



- PENYEDIA JASA :
1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN



- PENYEDIA JASA :
1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PETA RELASI

DISHUB 01.03

PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN
PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR

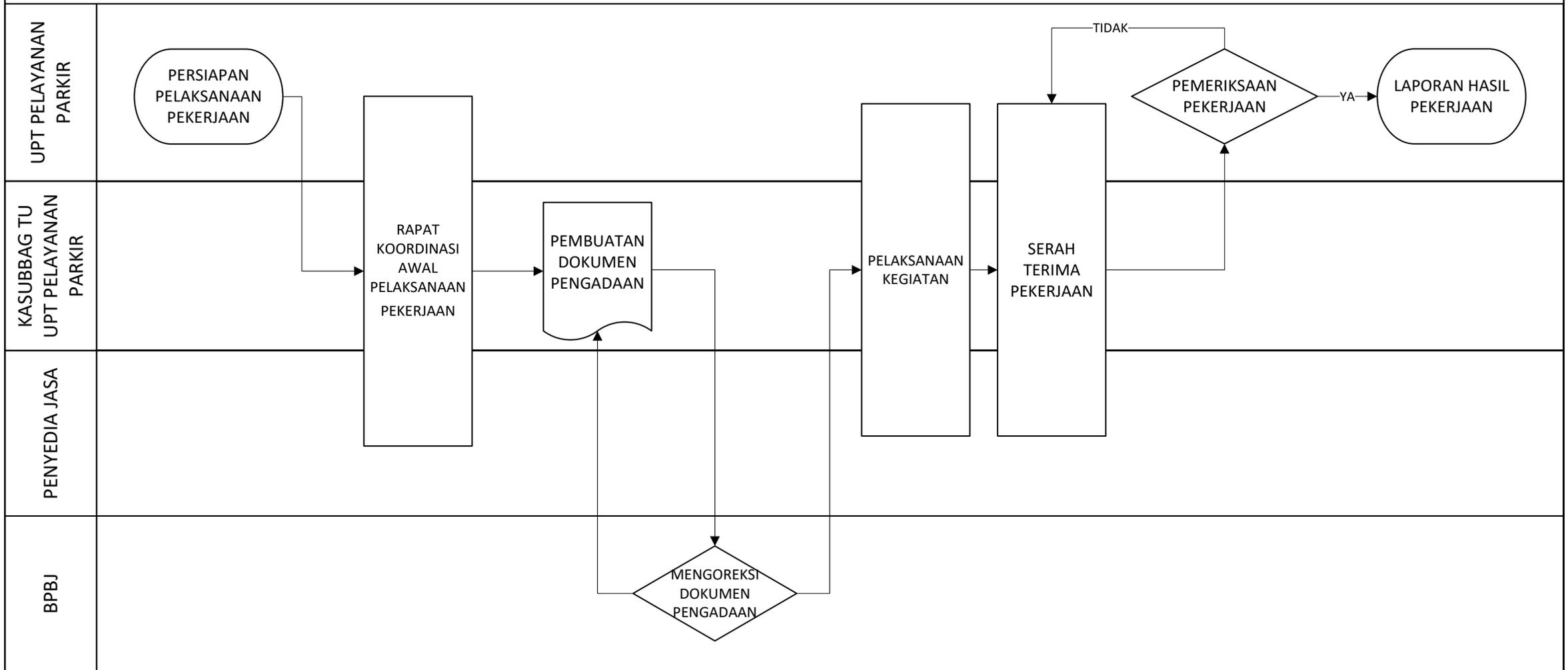
UPT PELAYANAN PARKIR

BIDANG LALU LINTAS

KEPALA DINAS

KASUBBAG TU UPT
PELAYANAN PARKIR

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PETA RELASI

DISHUB 01.04

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BIDANG ANGKUTAN
JALAN

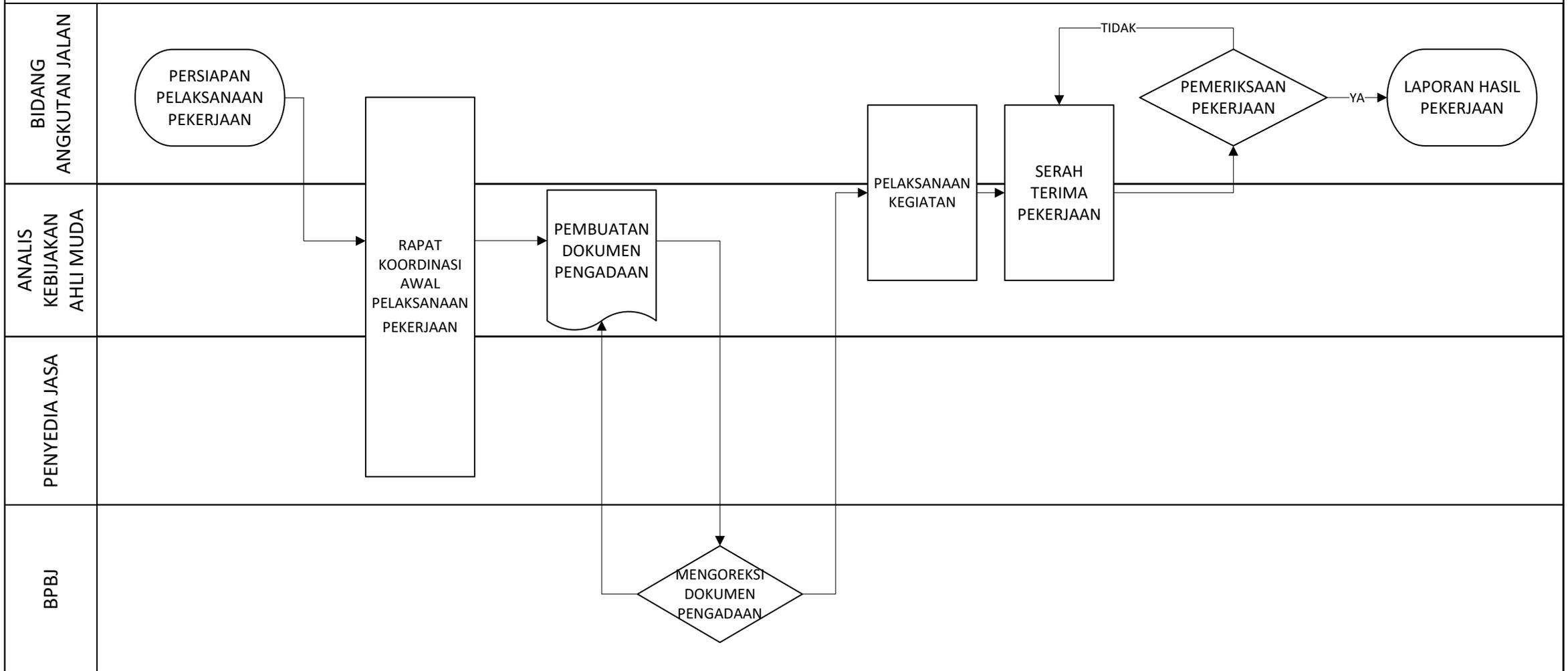
KEPALA DINAS

ANALIS KEBIJAKAN
AHLI MUDA

SEKSI ANGKUTAN ORANG

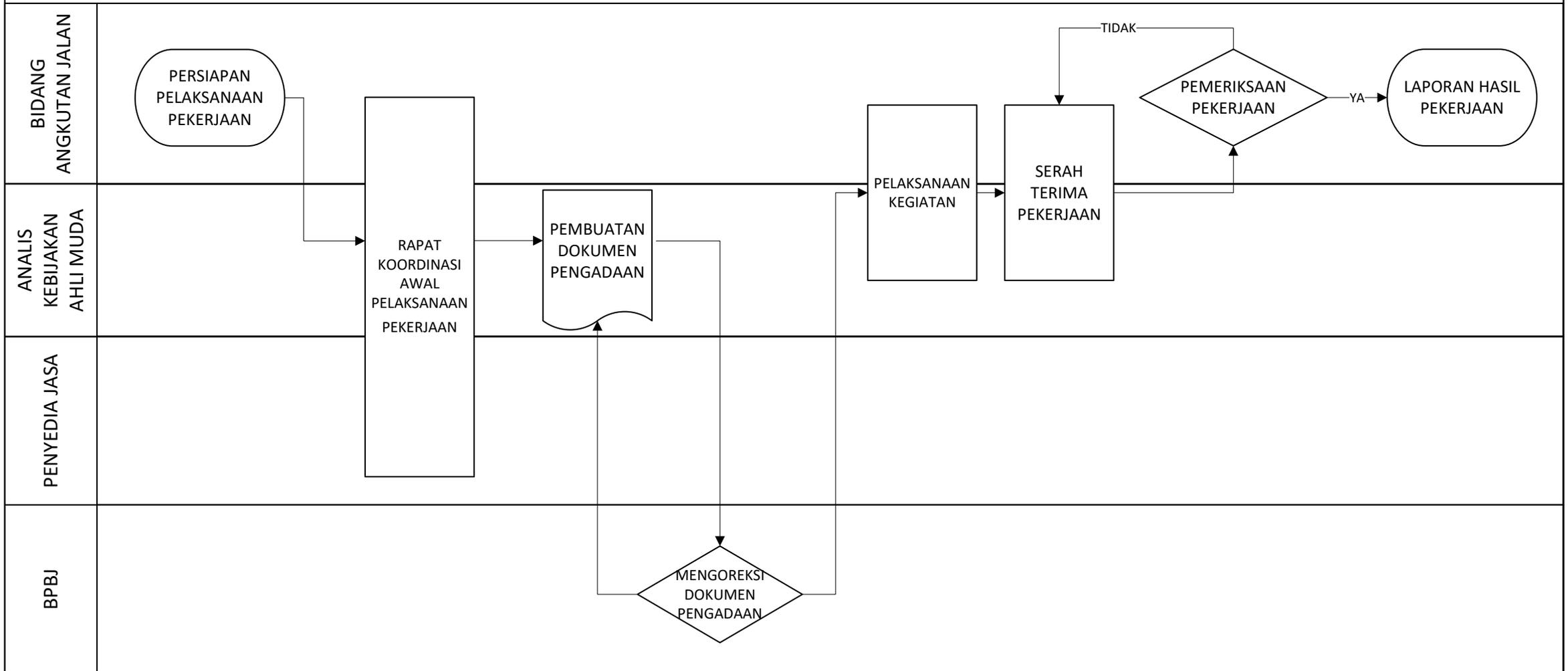
SEKSI ANGKUTAN
BARANG

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



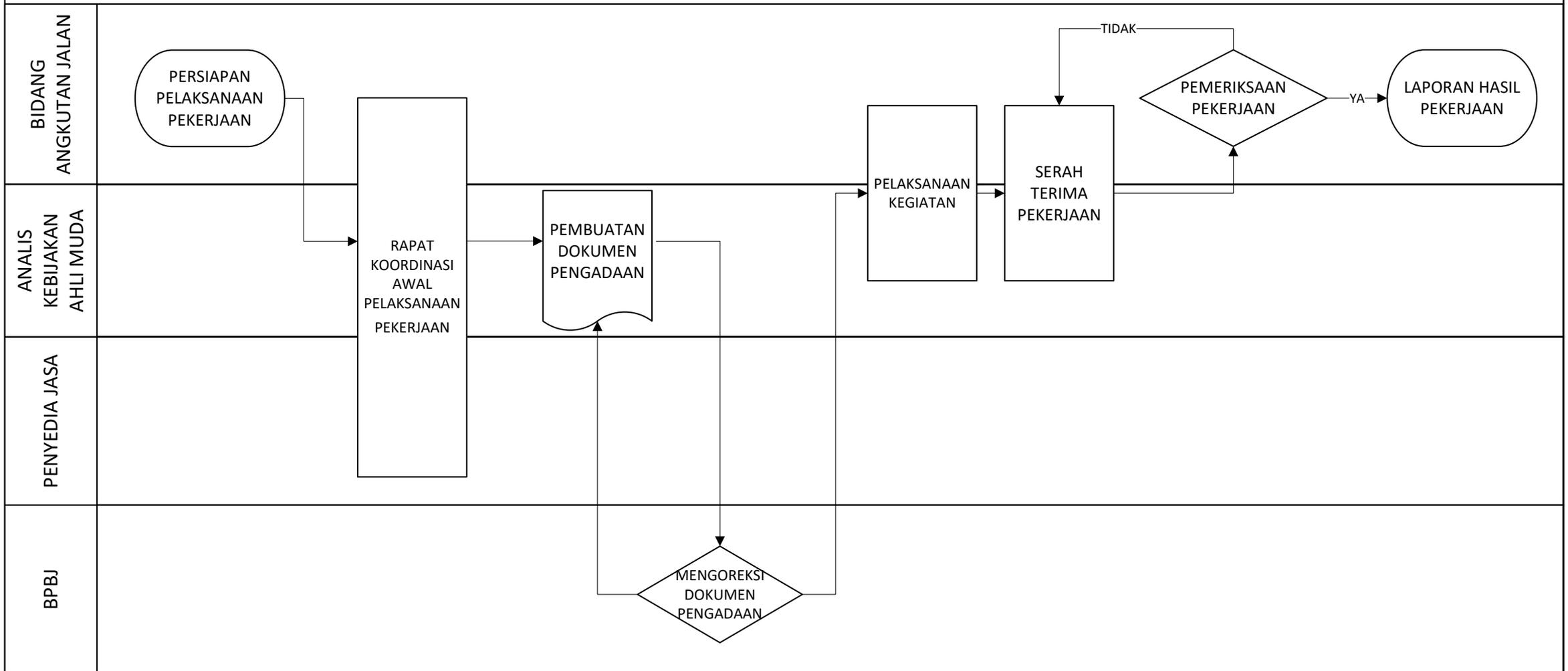
PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



PENYEDIA JASA :

1. Kontraktor
2. Konsultan Perencana
3. Konsultan Pengawas

PETA RELASI

DISHUB 01.05
PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU
LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA

BIDANG LALU LINTAS

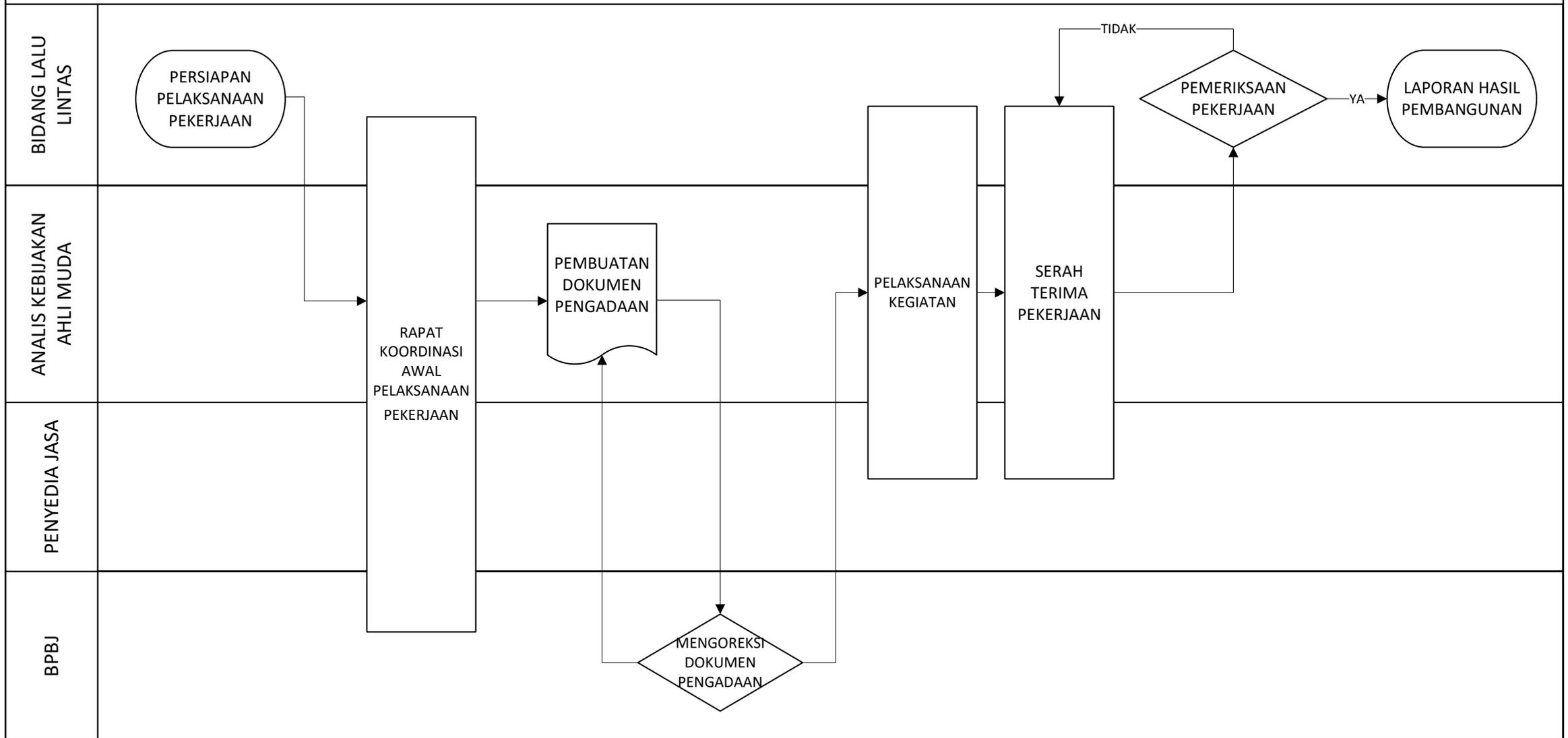
KEPALA DINAS

SEKSI MANAJEMEN
REKAYASA LALU
LINTAS

SEKSI PENGAWASAN
DAN PENERTIBAN
LALU LINTAS

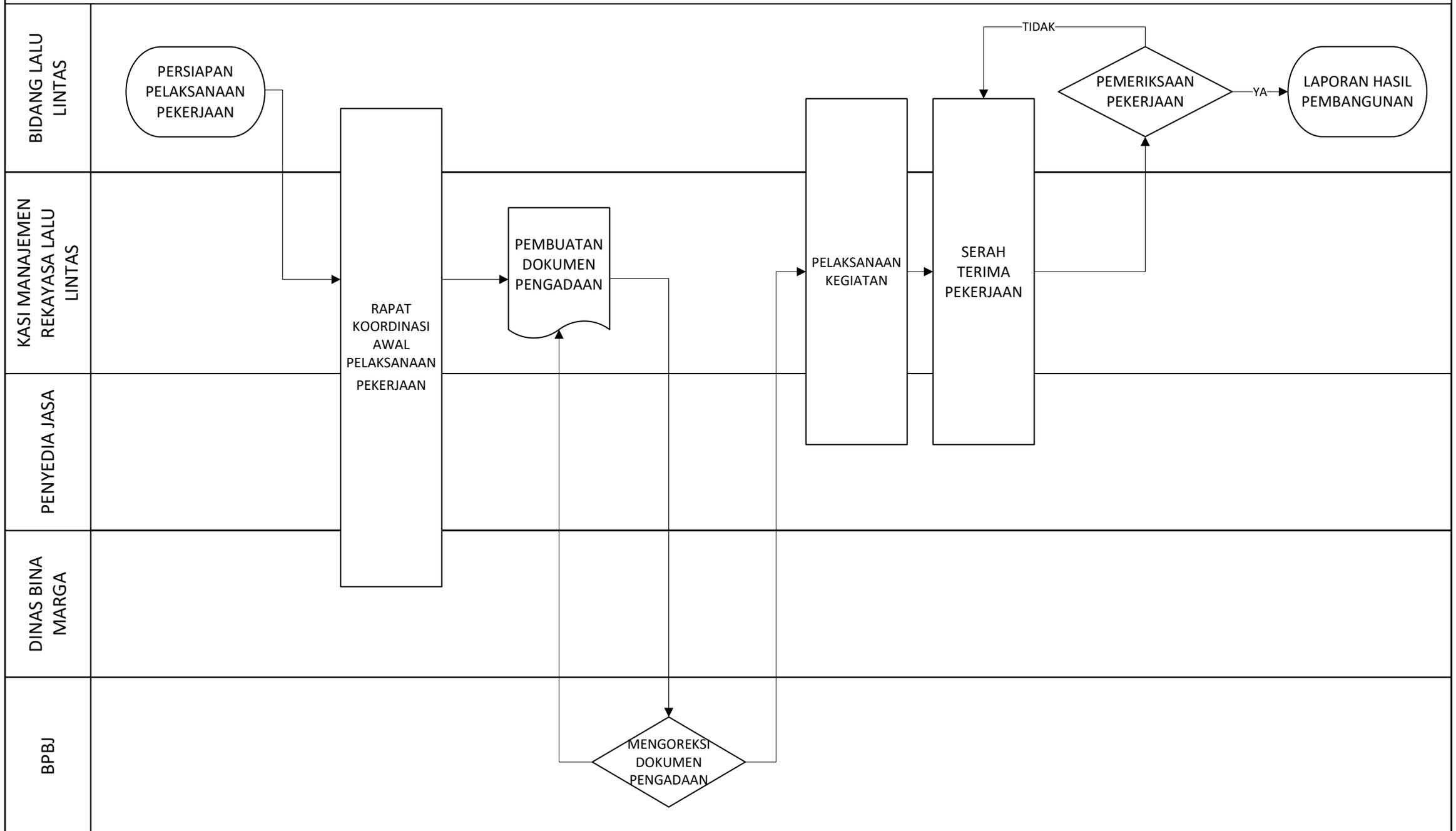
ANALIS KEBIJAKAN
AHLI MUDA

PEMBANGUNAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS)



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PENGADAAN, PEMASANGAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PETA RELASI

DISHUB 01.06

AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN

BIDANG LALU LINTAS

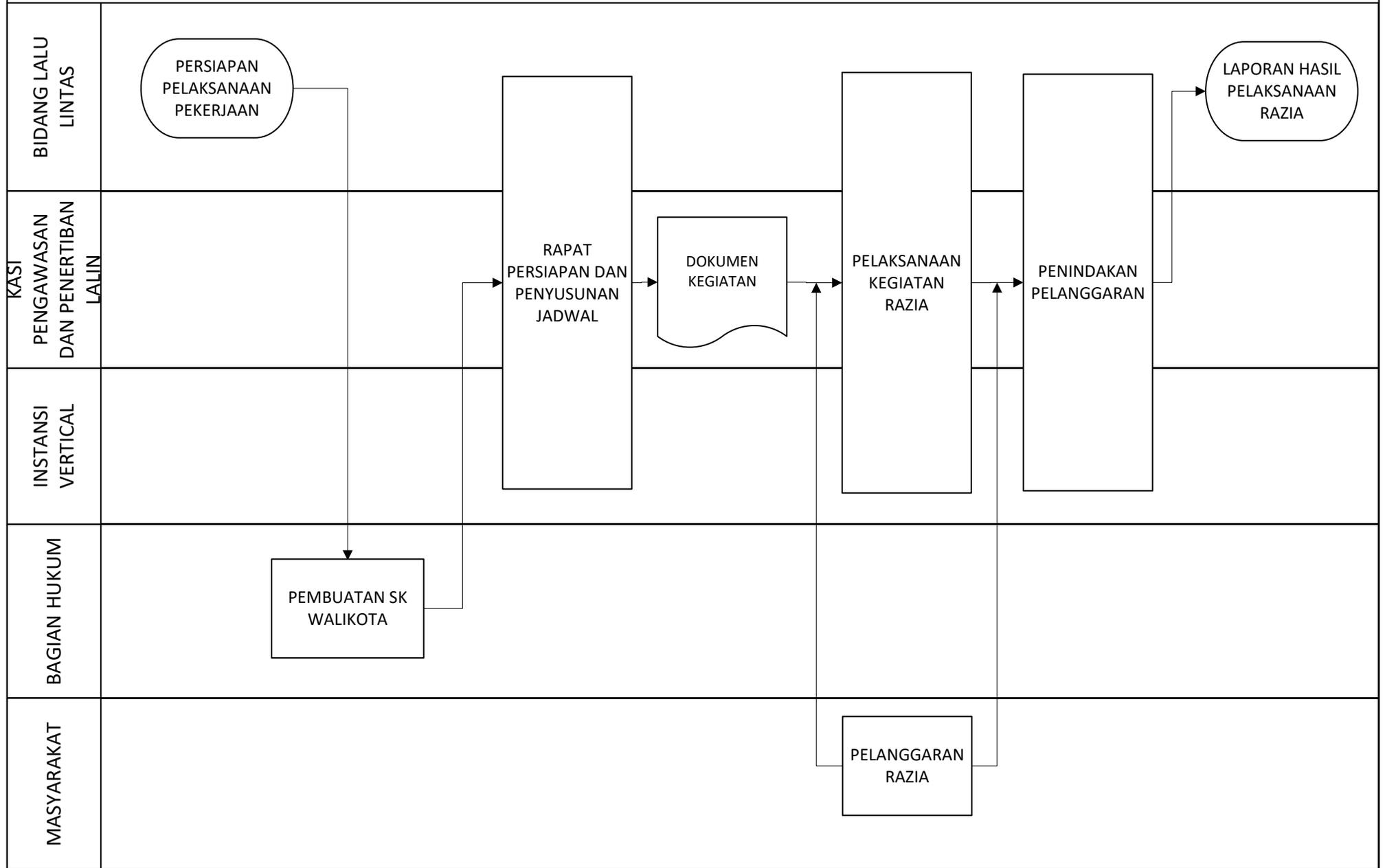
KEPALA DINAS

SEKSI PENGAWASAN
DAN PENERTIBAN LALU
LINTAS

SEKSI KESELAMATAN LALU
LINTAS

SEKSI MANAJEMEN
REKAYASA LALU LINTAS

PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA



Instansi Vertical :
 1. TNI
 2. Polisi
 3. Satpol PP

PETA RELASI

DISHUB 01.07

PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU
BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

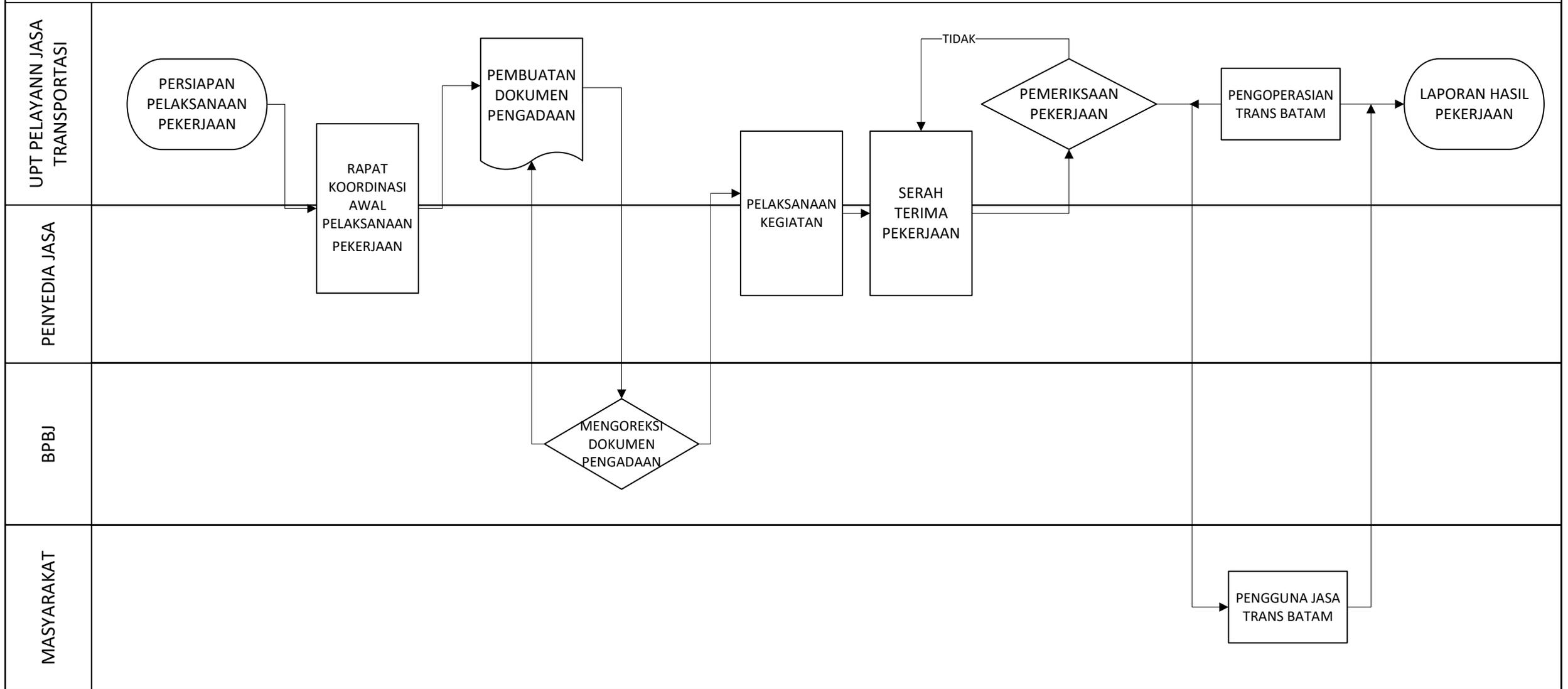
UPT PELAYANAN JASA
TRANSORTASI

BIDANG ANGKUTAN
JALAN

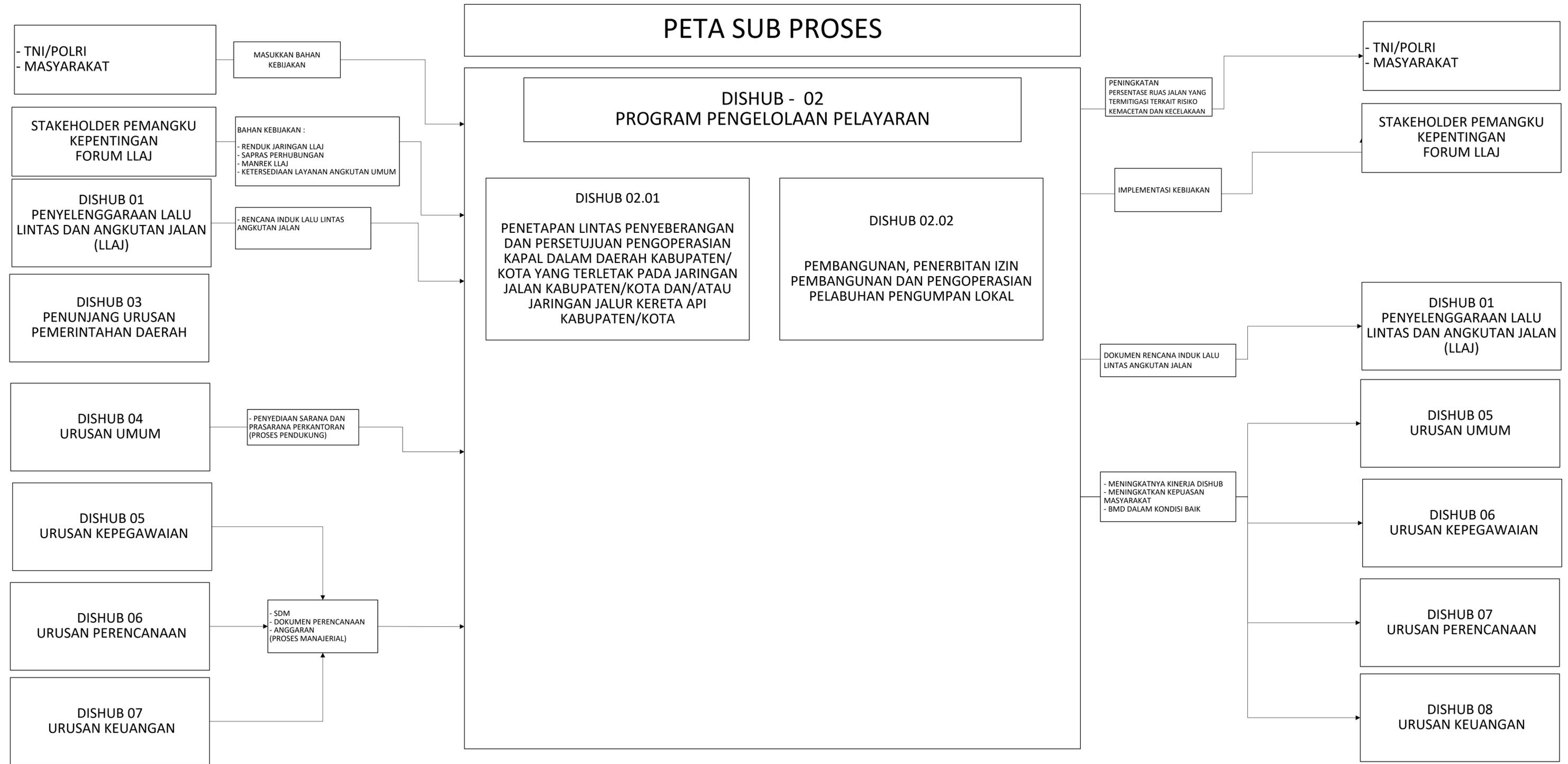
KEPALA DINAS

KASUBBAG TU UPT
PELAYANAN JASA
TRANSORTASI

PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas



PETA RELASI

DISHUB 02.01

PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN
KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU JARINGAN JALUR KERETA API KABUPATEN/KOTA

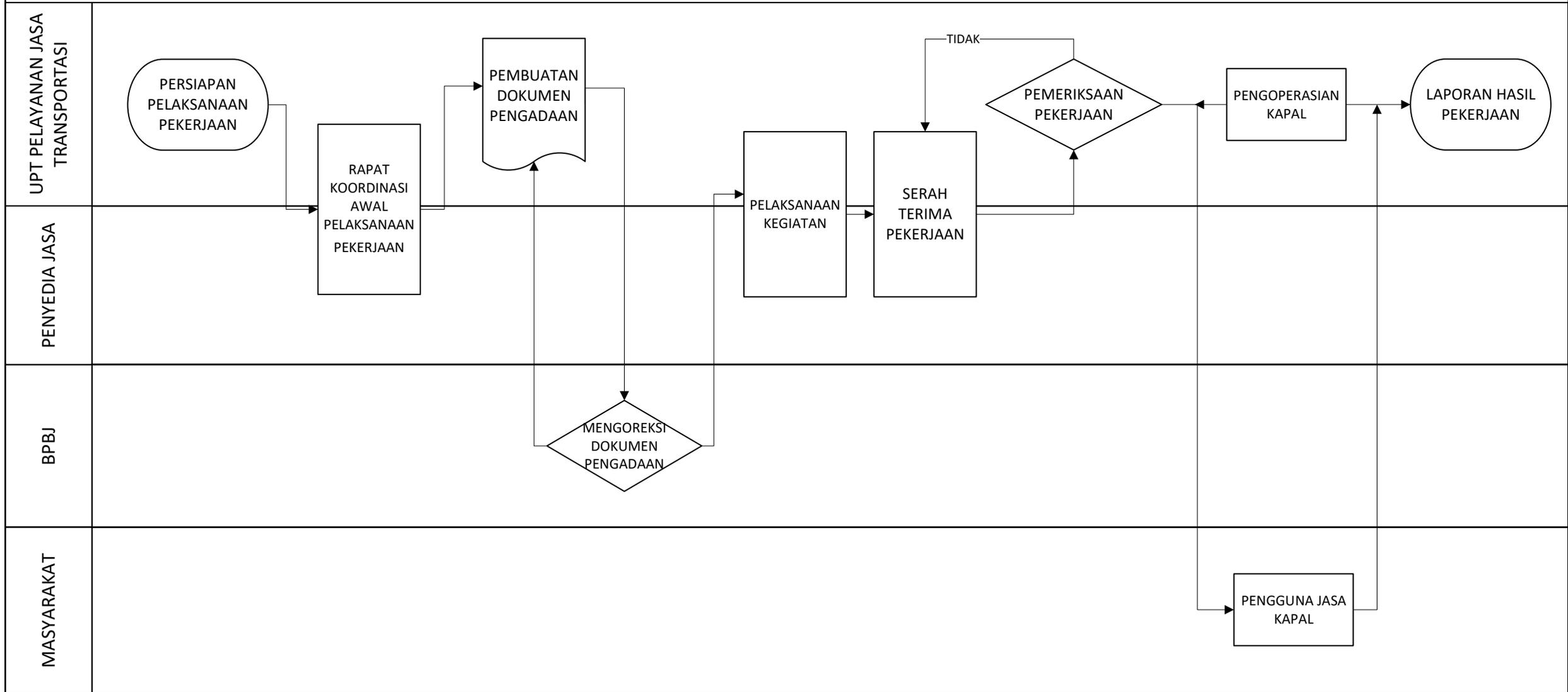
UPT PELAYANAN JASA
TRANSPORTASI

BIDANG ANGKUTAN
JALAN

KEPALA DINAS

KASUBBAG TU UPT
PELAYANAN JASA
TRANSPORTASI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN JARINGAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU JARINGAN JALUR KERETA API KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA



PENYEDIA JASA :

1. Kontraktor
2. Konsultan Perencana
3. Konsultan Pengawas

PETA RELASI

DISHUB 02.02

PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

BIDANG LAUT

BIDANG PRASARANA
PERHUBUNGAN

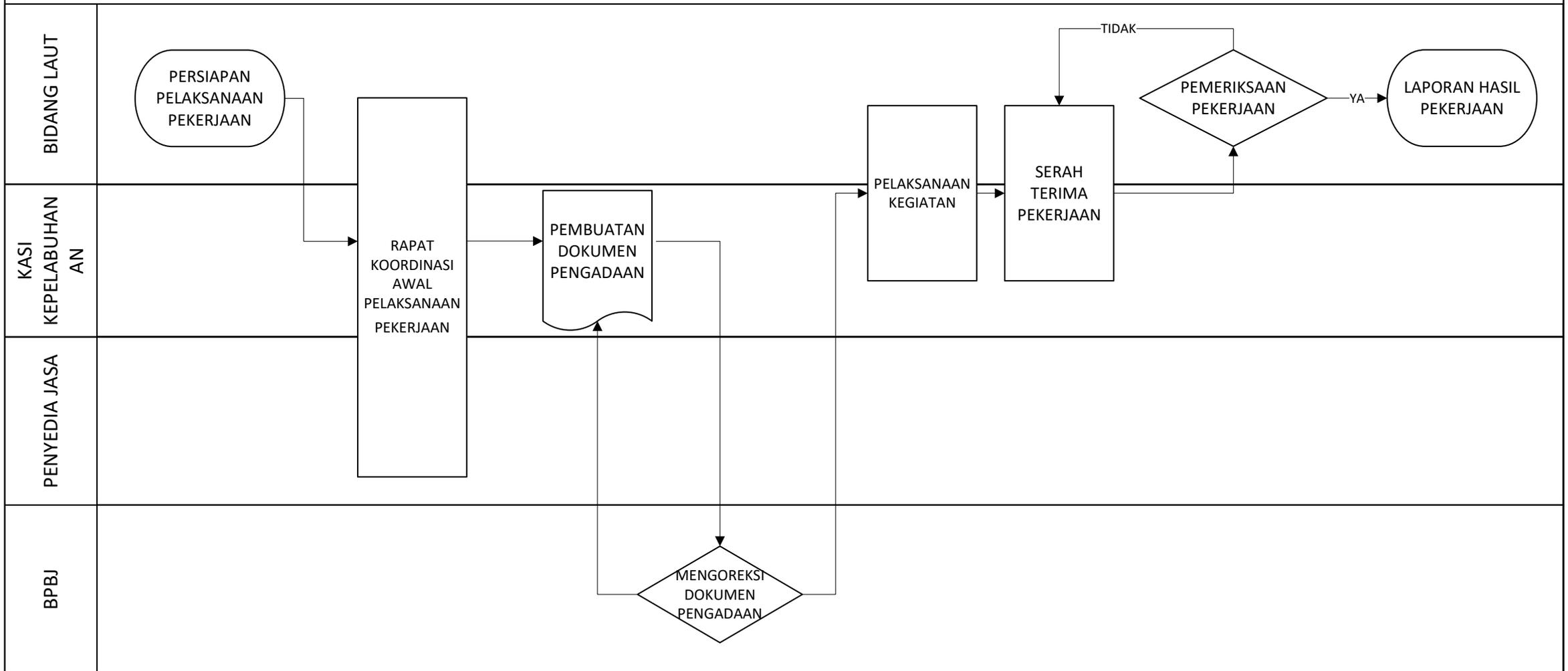
KEPALA DINAS

SEKSI KEPELABUHANAN

SEKSI KESELAMATAN

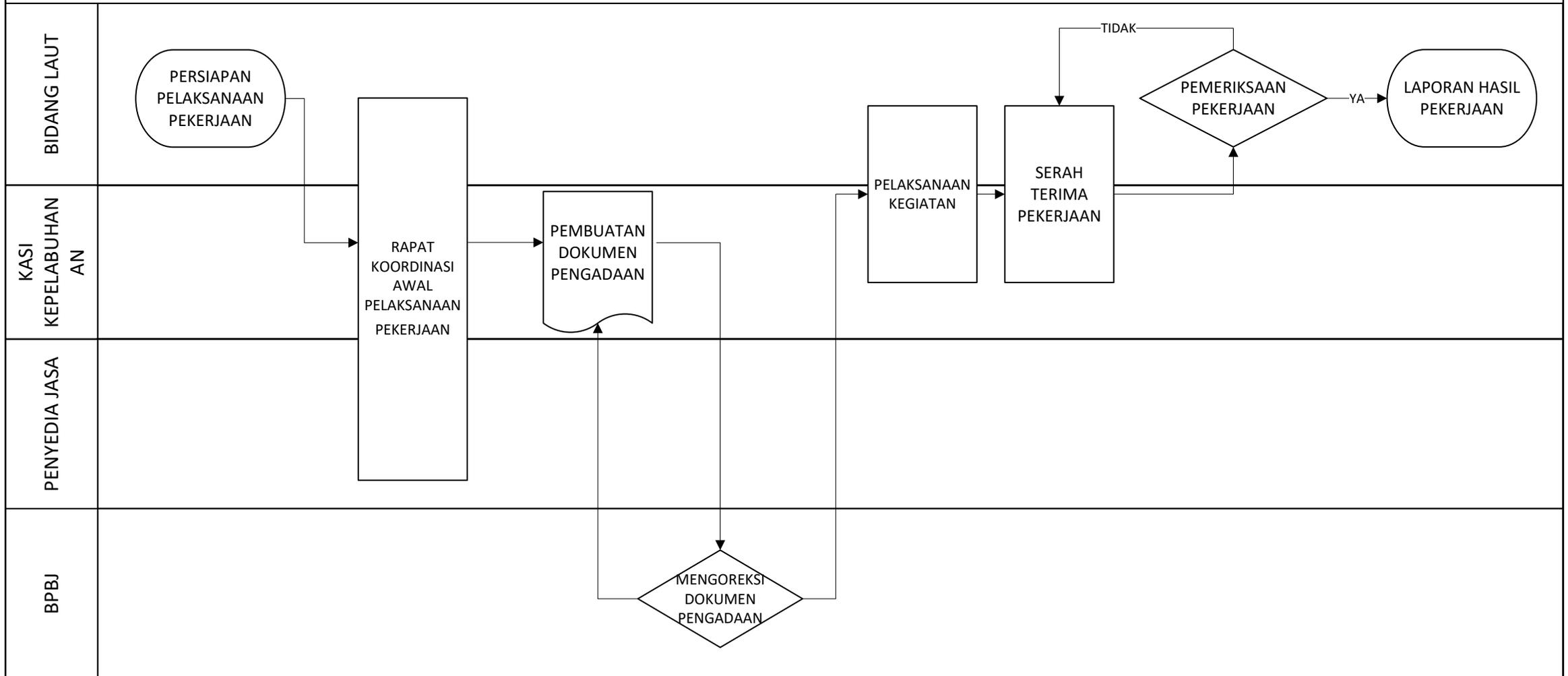
PELAYARAN

PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL



PENYEDIA JASA :
 1. Kontraktor
 2. Konsultan Perencana
 3. Konsultan Pengawas

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL



PENYEDIA JASA :

1. Kontraktor
2. Konsultan Perencana
3. Konsultan Pengawas